

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Fasilitas kredit umumnya diberikan oleh lembaga keuangan. Lembaga keuangan dalam dunia keuangan bertindak selaku lembaga yang menyediakan jasa keuangan bagi nasabahnya. Pada umumnya lembaga ini diatur oleh regulasi keuangan dari pemerintah. Bentuk umum dari lembaga keuangan ini adalah termasuk perbankan/*building society* (sejenis koperasi di Inggris), *Credit Union*, pialang saham, aset manajemen, modal ventura, koperasi, asuransi, dana pensiun, dan bisnis serupa lainnya.¹ Lembaga keuangan ini dapat diklasifikasikan menjadi 2 (dua) jenis, yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non bank (asuransi, pegadaian, perusahaan sekuritas, lembaga pembiayaan, dan lain-lain). Lembaga-lembaga keuangan ini memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam pemberian kredit yang ditujukan untuk kepentingan pribadi maupun untuk usahanya.

Suatu perjanjian pembiayaan konsumen tidak selalu dapat berjalan lancar. Yang biasanya terjadi adalah tertundanya pemenuhan kewajiban dari konsumen kepada pihak perusahaan pembiayaan, atau sering disebut wanprestasi. Oleh karena itulah, perjanjian pembiayaan konsumen yang dibuat oleh perusahaan pembiayaan selalu mengikutkan adanya jaminan fidusia. Hal ini dimaksudkan agar apabila terjadi masalah, misalnya wanprestasi,

¹http://id.wikipedia.org/wiki/Lembaga_keuangan, diakses tanggal 31 Oktober 2016, pukul 22:00 WIB.

eksekusinya dapat dengan mudah dilakukan, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 29², yang mengatur tentang eksekusi jaminan fidusia. Namun, meskipun Pasal 29 tersebut sudah mengatur demikian, ketentuan tersebut tidak memberikan aturan secara terperinci dan tegas bagaimana tata cara pelaksanaan eksekusi yang harus ditempuh oleh kreditur dan juga sampai saat ini tidak ada peraturan pelaksanaannya. Hal tersebut menjadi sangat riskan bagi para pihak dalam perjanjian pembiayaan konsumen tersebut,³ yang memberitakan bahwa telah terjadi gugatan oleh debitur kepada kreditur sebagai pihak pembiayaan konsumen, dalam kasus posisi sebagai berikut: Repni Meidiansyah adalah seorang debitur yang melayangkan gugatan terhadap PT. Adira Finance selaku kreditur pembiayaan konsumen. Menuding perusahaan pembiayaan itu melakukan perbuatan melawan hukum. Karena itu, ia meminta agar kendaraan yang disita oleh PT. Adira Finance dikembalikan dan semua tuntutan yang oleh PT. Adira Finance batal demi hukum.

Menurut Bambang, setidaknya ada tiga alasan yang membuat kliennya menggugat. Pertama, perjanjian kedua pihak ternyata tidak dikuatkan akta notaris. Kedua, perjanjian dan atau benda yang dibebani jaminan fidusia tidak didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia Kanwil Departemen Hukum dan HAM. Ketiga, penarikan mobil dilakukan tanpa menunjukkan sertifikat jaminan fidusia. Berdasarkan ketiga alasan itu, Repni menduga PT. Adira Finance melanggar Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

²Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

³www.hukumonline.com, diakses tanggal 30 Oktober 2016, pukul 20:00 WIB.

Berdasarkan latar belakang di atas, dalam skripsi ini peneliti akan mengkaji masalah dengan judul: **Eksekusi Janinan Fidusia Berdasarkan Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri No. 09/Pdt./2014/PT.TK).**

B . Rumusan Masalah

Sehubungan dengan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, penulis menetapkan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam eksekusi jaminan fidusia terkait Putusan Pengadilan Tinggi No. 09/ Pdt/ 2014/ PT.TK?
2. Bagaimana pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia dalam perjanjian pembiayaan konsumen oleh PT. Adira Finance Finance?

C. Tujuan Penelitian

Adapun mengenai tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Obyektif
 - a. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam eksekusi jaminan fidusia terkait Putusan Pengadilan Tinggi No. 09/ Pdt/ 2014/ PT.TK?
 - b. Bagaimana pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia dalam perjanjian pembiayaan konsumen oleh PT. Adira Finance?
2. Tujuan Subyektif
 - a. Untuk memperoleh data yang berhubungan dengan masalah yang diteliti sebagai bahan utama penyusunan penulisan hukum guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan di

bidang ilmu hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

- b. Untuk menambah wawasan dalam memperluas pemahaman arti pentingnya ilmu hukum dalam teori dan praktek, khususnya Hukum Acara.
- c. Untuk menerapkan konsep-konsep ataupun teori-teori hukum yang diperoleh penulis dalam mendukung penulisan hukum ini.

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian tentunya sangat diharapkan adanya manfaat dan kegunaan yang dapat diambil dalam penelitian tersebut. Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penulisan hukum ini antara lain:

1. Manfaat Teoritis

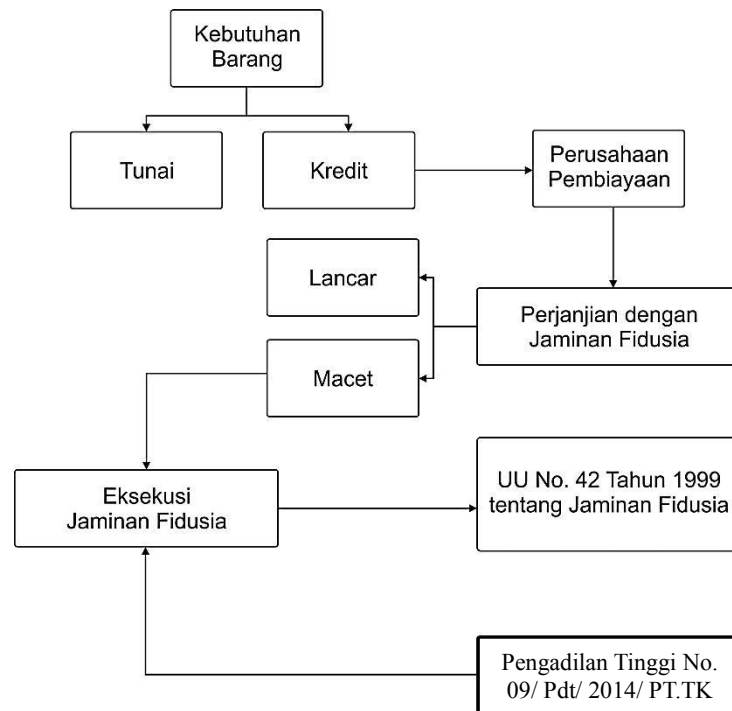
- a. Memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum acara pidana pada khususnya kaitannya dengan penyitaan jaminan dalam kredit macet/bermasalah.
- b. Sebagai bahan masukan untuk pengkajian dan penulisan karya ilmiah di bidang hukum.

2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang penulis teliti.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu dan memberi masukan serta tambahan pengetahuan bagi para pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti, dan berguna bagi para pihak yang

pada kesempatan lain mempunyai minat untuk mengkaji permasalahan yang sejenis.

E. Kerangka Penelitian



Gambar 1.1. Kerangka Pikir

Keterangan:

Dewasa ini, kebutuhan manusia akan barang dan kebutuhan dana/modal semakin meningkat. Kebutuhan tersebut tentu saja memerlukan biaya yang tidak sedikit sedangkan kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan tersebut terbatas. Misalnya, untuk membeli kendaraan bermotor, masyarakat mengajukan kredit perusahaan pembiayaan konsumen. Antara masyarakat (debitur) dan perusahaan pembiayaan konsumen (kreditur) terikat oleh perjanjian pembiayaan konsumen. Perjanjian pembiayaan konsumen tersebut mengikutkan adanya jaminan fidusia terhadap obyek pembiayaannya

sesuai dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Adanya jaminan fidusia ini dapat memberikan kemudahan dalam pelaksanaan eksekusinya apabila terjadi macet dalam pembayaran angsuran oleh debitur. Dalam menyelesaikan masalah ini, perusahaan pembiayaan konsumen akan melakukan eksekusi terhadap barang jaminan fidusia tersebut apabila debitur setelah diberi surat peringatan belum juga membayar angsuran. Pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia yang dilakukan oleh kreditur ini pada prakteknya masih terdapat penyimpangan terhadap Undang-Undang Jaminan Fidusia.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum doktrinal. Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.⁴ Penelitian doktrinal (*doctrinal research*) yaitu penelitian berdasarkan bahan-bahan hukum (*library based*) yang fokusnya pada membaca dan mempelajari bahan-bahan hukum primer dan sekunder.⁵ Penelitian hukum doktrinal ini memiliki pengertian sama dengan penelitian hukum normatif.

⁴Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenada Media, hal. 35.

⁵Johnny Ibrahim, 2006. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, hal. 44.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat preskriptif dan terapan. Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum adalah bersifat preskriptif. Penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru atas hasil penelitian yang telah dilakukan. Argumentasi di sini dilakukan untuk memberikan preskriptif mengenai benar atau tidaknya menurut hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum dari hasil penelitian.

Ilmu hukum mempunyai karakteristik sebagai ilmu yang bersifat preskriptif dan terapan.⁶

“Sebagai ilmu yang bersifat preskriptif, ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai, keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum. Sebagai ilmu terapan, ilmu hukum menetapkan standar prosedur, ketentuan-ketentuan, rambu-rambu dalam melaksanakan aturan hukum”.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus (*case approach*). Dalam menggunakan pendekatan kasus yang perlu dipahami oleh peneliti adalah *ratio decidendi*. Menurut Goodheart *ratio decidendi* dapat diketemukan dalam memperhatikan fakta materiil.⁷ Untuk menganalisis penelitian ini, maka peneliti akan menggunakan *ratio decidendi* hakim dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 1455 K/Pid/2013. Karena dalam pendekatan kasus ini bukanlah merujuk pada putusan pengadilannya, melainkan *ratio decidendi*.

⁶Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, hal. 44.

⁷*Ibid.*, hal. 135.

4. Jenis Bahan Hukum dan Sumber Bahan Hukum

Jenis bahan hukum yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum sekunder yaitu sejumlah bahan hukum atau fakta atau keterangan yang digunakan oleh seseorang yang secara tidak langsung dan diperoleh melalui bahan-bahan kepustakaan, terdiri dari literatur, dokumen-dokumen, peraturan perundang-undangan yang berlaku, laporan, desertasi, teori-teori dan sumber tertulis lainnya yang berkaitan dan relevan dengan masalah yang diteliti.⁸

Sumber bahan hukum yang digunakan berupa bahan hukum primer dan sekunder.

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif berupa peraturan perundang-undangan.⁹ Adapun yang penulis gunakan adalah:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
- 3) Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang No. 09/Pdt/2014/PT.TK

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan hukum primer: yaitu buku-buku ilmiah yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti, hasil penelitian

⁸*Ibid.*, hal. 141.

⁹*Ibid.*

yang relevan dan buku-buku penunjang lain.¹⁰

c. Analisis bahan hukum

Analisis bahan hukum yang digunakan yaitu silogisme deduktif. Sebuah analisis dengan menggunakan premis mayor berdasarkan undang-undang (hukum positif) sebagai ketentuan umumnya dan premis minornya adalah fakta hukum.¹¹ Berdasarkan kedua hal tersebut kemudian dapat ditarik suatu konklusi guna mendapatkan jawaban atas rumusan masalah.¹² Kemudian diajukan premis minor (bersifat khusus), dari kedua premis itu kemudian ditarik suatu kesimpulan atau *conclusion*. Akan tetapi di dalam argumentasi hukum, silogisme hukum tidak sesederhana silogisme tradisional.¹³

Jadi dapat disimpulkan bahwa logika deduktif atau pengolahan bahan hukum dengan cara deduktif yaitu menjelaskan suatu hal yang bersifat umum kemudian menariknya menjadi kesimpulan yang lebih khusus.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, dalam bab ini penulis akan menguraikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

¹⁰Soerjono Soekanto, 2005, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia (UI Press), hal. 52.

¹¹Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang No. 09/ Pdt/ 2014/ PT.TK

¹²Peter Mahmud Marzuki, *Loc. Cit*, hal. 89-90.

¹³*Ibid.*

Bab II Tinjauan Pustaka, dalam bab ini penulis menguraikan mengenai tentang teori landasan pemikiran dan pembahasan yaitu dengan teknik analisis data beserta sub bab bagian penelitian.

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan, dalam bab ini diuraikan tentang tinjauan hukum terkait dengan pelaksanaan Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang No. 09/Pdt/2014/PT.TK.

Bab IV Penutup, dalam bab ini berisi mengenai kesimpulan dan saran terkait dengan pembahasan permasalahan yang telah diteliti.